



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019



PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II

**Jl. Soekarno-Hatta II, Kel. Arung Dalam,
Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah
Kepulauan Bangka Belitung**

Telp./Fax 0718-6911210

Email: pengadilan.negeri.koba@gmail.com

Website: www.pn-koba.go.id



Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

**KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI KOBA**



YULIANA, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Negeri Koba Kelas II



SUBRANTO, S.H., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Koba Kelas II

HAKIM
PENGADILAN NEGERI KOBA



RONY DANIEL RICARDO, S.H., M.H.

**PEJABAT KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI KOBA**



RAHARDHI PERDANA, S.H., M.H.
Panitera



PADLI, S.H.
Panitera Muda Perdata



YUSBET HARIRI, S.H.
Panitera Muda Pidana



ERWIN MARANTIKA, S.H.
Panitera Muda Hukum

**PEJABAT KESEKRETARIATAN
PENGADILAN NEGERI KOBA**



JAMALUDIN, S.H.
Sekretaris



NUR KAMALIA, S.H.
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana



YEYEN WAHYUNI, S. Kom.
Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan



OSKAR SYAIFULLAH, S.Kom.
Kasubbag. Umum dan Keuangan

**JURUSITA
PENGADILAN NEGERI KOBA**



EKO ARFANDI, S.H.



MARIHOT PANGIHUTAN

**STAF KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN
PENGADILAN NEGERI KOBA**



HARDI JUMAIDI, S.H.
Staf Kepaniteraan Perdata



SARTIKA RATNASARI SINAGA, S.E.
Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan



ABAD RIBUNANURIN, A.Md.
Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Koba Tahun 2019 ini.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami buat sebagai laporan tentang apa yang telah dilakukan dan dicapai oleh Pengadilan Negeri Koba, dengan kata lain laporan ini sebagai wujud nyata pertanggungjawaban kinerja dari personil yang ada di Pengadilan Negeri Koba. Dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini, dapat dilihat bagaimana hasil pelaporan tentang Manajemen Perkara, Manajemen Aset, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. Pengadilan Negeri Koba berkeinginan dan bertekad untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan cepat, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan “Peradilan yang Agung” sebagaimana tertuang dalam visi Mahkamah Agung RI. Pembuatan laporan tahunan ini jauh dari kata sempurna tapi kami selalu berupaya untuk memberikan laporan sebaik, secepat dan seefektif mungkin dan tidak tertutup kemungkinan kami menerima saran dan masukan guna perbaikan laporan-laporan di masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kami yang tak terhingga untuk seluruh personil Pengadilan Negeri Koba, atas semua jerih payah, bantuan dan kerjasama yang baik guna menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini. Semoga kinerja kita semakin baik, sukses di tahun-tahun mendatang dan tercapai apa yang menjadi target kerja selama ini. Amin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr. Wb.

Koba, 09 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Koba,

YULIANA, S.H., M.H.
NIP. 19750703 200012 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kebijakan Umum Peradilan	1
C. Visi Dan Misi.....	3
D. Rencana Strategis (Renstra)	3
BAB II	
A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM	5
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	5
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	6
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	7
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	8
B. PENYELESAIAN PERKARA	9
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	9
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	10
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK	11
4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi	12
5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi	12
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU.....	12
1. Posbakum	12
2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu	13
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	13
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....	15
1. Mutasi.....	16

2. Promosi	17
3. Pensiun	17
4. Diklat	17
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN	
TEKNOLOGI INFORMASI	20
A. Pengelola Keuangan	20
B. Pengelola Sarana dan Prasarana	29
C. Pengelola Teknologi Informasi	34
1. Implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Umum	34
2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum	36
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	39
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	39
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	39
C. Inovasi Pelayanan Publik	40
BAB VI PENGAWASAN	45
A. Internal	45
B. Evaluasi.....	45
BAB VII PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Rekomendasi	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1. 1. Perkara Pidana Tingkat Pertama	5
Tabel 2.1.1. 2. Perkara Perdata Tingkat Pertama	5
Tabel 2.1.2. 1. Perkara Pidana Tingkat Banding	6
Tabel 2.1.2. 2. Perkara Perdata Tingkat Banding	6
Tabel 2.1.3. 1. Perkara Pidana Tingkat Kasasi.....	7
Tabel 2.1.3. 2. Perkara Perdata Tingkat Kasasi	7
Tabel 2.1.4. 1. Perkara Pidana Tingkat Peninjauan Kembali.....	8
Tabel 2.1.4. 2. Perkara Perdata Tingkat Peninjauan Kembali	8
Tabel 2.2. 1. Matriks Keadaan Perkara pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba Tahun 2019	9
Tabel 2.2. 2. Data Keadaan Perkara Periode 2 Tahun Terakhir (2018-2019)	10
Tabel 2.2. 3. Data Jumlah Penyelesaian Perkara (Putus Tepat Waktu) Tahun 2019	10
Tabel 2.2. 4. Putusan yang diajukan Upaya Hukum pada Tahun 2019	11
Tabel 2.2. 5. Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Selama 2 Tahun Terakhir	12
Tabel 3. 1. Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/ golongan/ pendidikan	15
Tabel 3. 2. Tenaga Teknis dan Non Teknis Tahun 2019.....	16
Tabel 3. 3. Data Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim	18
Tabel 3. 4. Pelatihan Diklat Kepemimpinan	18
Tabel 3. 5. Diklat Pelatihan Teknis Umum/ Administrasi Manajemen.....	19
Tabel 4.1. 1. Alokasi Anggaran Pengadilan Negeri Koba selama 3 (Tiga) Tahun Terakhir (dalam Rupiah)	21
Tabel 4.1. 2. Realisasi Penyerapan Anggaran Per Program	24

Tabel 4.1. 3. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) per Jenis Belanja	24
Tabel 4.1. 4. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) per Jenis Belanja	25
Tabel 4.1. 5. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir	26
Tabel 4.1. 6. Target dan Realisasi PNBPN UMUM Per Akun	27
Tabel 4.1. 7. Target dan Realisasi PNBPN FUNGSIONAL Per Akun	27
Tabel 4.2. 1. Data Aset Tanah dalam Penguasaan Pengadilan Negeri Koba	29
Tabel 4.2. 2. Data Aset Gedung dan Bangunan dalam Penguasaan Pengadilan Negeri Koba.....	30
Tabel 4.2. 3. Kendaraan Dinas dalam Penguasaan Pengadilan Negeri Koba.....	30
Tabel 4.2. 4. Matriks Sarana dan Prasarana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba	31
Tabel 4.3. 1. Rincian Spesifikasi Server Penunjang SIPP pada Pengadilan Negeri Koba	36
Tabel 4.3. 2. Daftar Perangkat Penunjang Teknologi Informasi	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.3. 1. Tampilan Daftar Gugatan Online pada Aplikasi e-Court	35
Gambar 4.3. 2. Tampilan Daftar Gugatan Sederhana Online	35
Gambar 4.3. 3. Tampilan Daftar Permohonan Online	35
Gambar 4.3. 4. Tampilan Halaman Login Aplikasi SIPP	37
Gambar 4.3. 5. Tampilan Halaman Login Aplikasi MIS	37
Gambar 5. 1. Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40
Gambar 5. 2. Tampilan Halaman Direktori Putusan Pengadilan Negeri Koba.....	41
Gambar 5. 3. Menu Antrian Direktori Putusan pada Aplikasi SIPP	41
Gambar 5. 4. Tampilan Halaman Login Aplikasi e-SIGAP.....	42
Gambar 5. 5. Tampilan Halaman Depan Aplikasi e-SIGAP	42
Gambar 5. 6. Tampilan Halaman Login Aplikasi Eraterang	43
Gambar 5. 7. Petugas Siap Melayani Masyarakat Pencari Keadilan.....	44

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1. 1. Alokasi Anggaran Pengadilan Negeri Koba dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir (dala Rupiah)	22
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI bahwa setiap satuan kerja diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya secara berjenjang kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi sebagai koordinator di wilayah masing-masing.

Penyampaian laporan dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari kegiatan manajemen yaitu sebagai sarana fungsi pengawasan (*controlling*). Artinya laporan sebagai hasil dari penelaahan pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu dijadikan sebagai acuan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan/ penentu kebijakan guna pelaksanaan kegiatan periode yang akan datang.

Tahapan penyusunan laporan dimulai dari tahapan persiapan berupa monitoring yaitu pengumpulan data laporan dan penyelarasan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan. Tahap selanjutnya adalah dilakukan evaluasi atas data yang masuk termasuk didalamnya tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Kemudian tahap terakhir adalah penyusunan dalam bentuk laporan.

B. Kebijakan Umum Peradilan

Sebagaimana diketahui bahwa kedudukan dan substansi badan Peradilan Umum semakin jelas dan mantap, sesuai pasal 24 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia, Pasal 2 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Koba merupakan salah satu pelaksana kekuasaan

kehakiman di lingkungan peradilan umum yang baru diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Yang Mulia Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH selaku Ketua Mahkamah Agung RI yang dipusatkan di Kota Melonguane berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Yang Baru.

Pengadilan Negeri Koba juga mempunyai tugas pokok yang sama dengan pengadilan negeri lainnya yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 1986.

Dalam menjalankan organisasi perkantoran, Pengadilan Negeri Koba mengacu pada restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung jo. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/ 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI serta PERMA No.7 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan & Sekretariat Peradilan.

Pengadilan Negeri Koba mencakup 6 (enam) wilayah Kecamatan :

1. Kecamatan Koba
2. Kecamatan Lubuk Besar
3. Kecamatan Namang
4. Kecamatan Sungai Selan
5. Kecamatan Simpang Katis
6. Kecamatan Pangkalan Baru

Dengan adanya Pengadilan Negeri Koba pada prinsipnya untuk meningkatkan pelayanan dibidang hukum Perdata, Pidana yang menjadi kewenangan dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan serta dan tercapainya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan murah.

C. Visi dan Misi

Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang multi kompleks dalam menangani perkara-perkara Perdata, Pidana yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Pengadilan Negeri dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Umum yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Peradilan Negara tertinggi.

Dengan sistem Peradilan Satu Atap (One Roof System) dari empat lingkungan peradilan, maka Pengadilan Negeri Koba mempunyai visi yang sama dengan visi Mahkamah Agung RI yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Koba yang Agung.”

Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan Misi-Misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Koba.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Koba.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Koba.

D. Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Koba.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Koba adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Koba;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Koba adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sesuai dengan arahan-arahan tertuang dalam cetak biru Pembaruan Peradilan, beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penentuan kebijakan Pengadilan Negeri Koba adalah :

- Perbaikan manajemen perkara yang meliputi kedisiplinan dalam hal pelaporan-pelaporan perkara yang dilakukan secara rutin dan tepat waktu;
- Perbaikan minutasasi perkara;
- Perbaikan administrasi perkara dan berkas putusan;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengikutkan dalam program diklat. Hal ini juga berkaitan dengan regenerasi SDM yang dilakukan oleh Mahkamah Agung;
- Penertiban pengelolaan anggaran dan aset;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung adanya keterbukaan informasi dan pelayanan publik.

Sistem pengawasan internal yang telah berjalan masih akan tetap dipertahankan, disamping juga ada pengawasan eksternal yang berasal baik dari badan-badan pemerintahan maupun dari organisasi independen.

BAB II

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

a. Perkara Pidana Tingkat Pertama

Tabel 2.1.1. 1. Perkara Pidana Tingkat Pertama

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA	KET
1	Pidana	22	143	150	15	
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	
3	Pra-Peradilan	-	-	-	-	
4	Pidana Cepat	-	3	3	-	
5	Pidana Lalu Lintas	-	1.932	1.932	-	
JUMLAH		22	2.078	2.085	15	

b. Perkara Perdata Tingkat Pertama

Tabel 2.1.1. 2. Perkara Perdata Tingkat Pertama

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA	KET
1	Perdata Gugatan	3	31	30	4	
2	Perdata Gugatan Sederhana	-	5	5	-	
3	Perdata Permohonan	4	50	54	-	
JUMLAH		7	86	89	4	

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

a. Perkara Pidana Tingkat Banding

Tabel 2.1.2. 1. Perkara Pidana Tingkat Banding

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA	KET
1	Pidana	-	6	6	-	
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	
3	Pra-Peradilan	-	-	-	-	
4	Pidana Cepat	-	-	-	-	
5	Pidana Lalu Lintas	-	-	-	-	
JUMLAH		-	6	6	-	

b. Perkara Perdata Tingkat Banding

Tabel 2.1.2. 2. Perkara Perdata Tingkat Banding

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA	KET
1	Perdata Gugatan	-	2	2	-	
2	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-	
3	Perdata Permohonan	-	-	-	-	
JUMLAH		-	2	2	-	

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

a. Perkara Pidana Tingkat Kasasi

Tabel 2.1.3. 1. Perkara Pidana Tingkat Kasasi

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA	KET
1	Pidana	-	1	-	1	
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	
3	Pra-Peradilan	-	-	-	-	
4	Pidana Cepat	-	-	-	-	
5	Pidana Lalu Lintas	-	-	-	-	
JUMLAH		-	1	-	1	

b. Perkara Perdata Tingkat Kasasi

Tabel 2.1.3. 2. Perkara Perdata Tingkat Kasasi

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA	KET
1	Perdata Gugatan	-	2	-	2	
2	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-	
3	Perdata Permohonan	-	-	-	-	
JUMLAH		-	2	-	2	

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

a. Perkara Pidana Tingkat Peninjauan Kembali

Tabel 2.1.4. 1. Perkara Pidana Tingkat Peninjauan Kembali

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA	KET
1	Pidana	-	-	-	-	
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	
3	Pra-Peradilan	-	-	-	-	
4	Pidana Cepat	-	-	-	-	
5	Pidana Lalu Lintas	-	-	-	-	
JUMLAH		-	-	-	-	

b. Perkara Perdata Tingkat Peninjauan Kembali

Tabel 2.1.4. 2. Perkara Perdata Tingkat Peninjauan Kembali

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA	KET
1	Perdata Gugatan	-	-	-	-	
2	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	-	
3	Perdata Permohonan	-	-	-	-	
JUMLAH		-	-	-	-	

B. PENYELESAIAN PERKARA

Tabel 2.2. 1. Matriks Keadaan Perkara pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba Tahun 2019

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA	KET
1	Pidana	22	143	150	15	
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	
3	Pra-Peradilan	-	-	-	-	
4	Pidana Cepat	-	3	3	-	
5	Pidana Lalu Lintas	-	1.932	1.932	-	
6	Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	
7	Perdata Gugatan	3	31	30	4	
8	Perdata Gugatan Sederhana	-	5	5	-	
9	Perdata Permohonan	4	50	54	-	
10	Perselisihan Hubungan Industrial	-	-	-	-	
JUMLAH		29	2.164	2.174	19	

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara pada tahun 2019 sebanyak 19 perkara, berkurang 34,48% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu berjumlah sebanyak 29 perkara. Rasio sisa perkara dibandingkan dengan jumlah beban perkara tahun 2019 adalah sebesar 0,87%, berkurang 3,13% dari tahun 2018 dengan 4,00%.

Tabel 2.2. 2. Data Keadaan Perkara Periode 2 Tahun Terakhir (2018-2019)

NO	TAHUN	SISA TAHUN LALU	MASUK	JUMLAH BEBAN PERKARA	PUTUS	SISA AKHIR TAHUN	% SISA VS BEBAN
1	2018	-	724	724	695	29	4,00%
2	2019	29	2.164	2.193	2.174	19	0,87%

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Koba menerima perkara sebanyak 2.193 perkara dan yang berhasil diputus tepat waktu (dalam waktu 5 bulan) sebanyak 2.170 perkara. Perbandingan antara jumlah perkara masuk dan perkara yang diputus tepat waktu sebesar 98,95%.

Tabel 2.2. 3. Data Jumlah Penyelesaian Perkara (Putus Tepat Waktu) Tahun 2019

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH BEBAN PERKARA	PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU	%
1	Pidana	165	150	90,90
2	Pidana Singkat	-	-	-
3	Pra-Peradilan	-	-	-
4	Pidana Cepat	3	3	100
5	Pidana Lalu Lintas	1.932	1.932	100
6	Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi	-	-	-
7	Perdata Gugatan	34	26	76,47
8	Perdata Gugatan Sederhana	5	5	100
9	Perdata Permohonan	54	54	100
10	Perselisihan Hubungan Industrial	-	-	-
JUMLAH		2.193	2.170	98,95

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Putusan berkekuatan hukum tetap yang tidak diajukan upaya hukum pada tahun 2019 sebanyak 144 perkara Pidana, 3 perkara Pidana Cepat, 1.932 perkara Pidana Lalu Lintas, 28 perkara Perdata Gugatan, 5 Perkara Perdata Gugatan Sederhana, dan 54 perkara Perdata Permohonan.

Tabel 2.2. 4. Putusan yang diajukan Upaya Hukum pada Tahun 2019

NO	JENIS PERKARA	UPAYA HUKUM YANG DIAJUKAN			YANG TIDAK DIAJUKAN UPAYA HUKUM
		BANDING	KASASI	PK	
1	Pidana	6	1	-	144
2	Pidana Singkat	-	-	-	-
3	Pra-Peradilan	-	-	-	-
4	Pidana Cepat	-	-	-	3
5	Pidana Lalu Lintas	-	-	-	1.932
6	Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
7	Perdata Gugatan	2	2	-	28
8	Perdata Gugatan Sederhana	-	-	-	5
9	Perdata Permohonan	-	-	-	54
10	Perselisihan Hubungan Industrial	-	-	-	-
JUMLAH		8	3	-	2.166

4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ada beberapa hal baru yang diatur salah satunya adalah mengenai kesepakatan sebagian yang dianggap sebagai keberhasilan mediasi. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kemungkinan pejabat pengadilan non-hakim untuk menjadi mediator juga diakomodasi dalam Perma ini.

Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Koba melakukan mediasi terhadap 2 perkara perdata, 1 (satu) tidak berhasil dan 1 (satu) lagi masih proses mediasi.

5. Jumlah Perkara Anak yang Diselesaikan Melalui Diversi

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Koba menerima perkara Pidana Anak sebanyak 11 perkara dan 1 (satu) perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses diversi. Perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang masuk dan perkara yang diselesaikan melalui diversi sebesar 9,09%. Nilai ini naik dibandingkan tahun sebelumnya pada angka 0%.

Tabel 2.2. 5. Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Selama 2 Tahun Terakhir

NO	TAHUN	MASUK	DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI	% SELESAI VS MASUK
1	2018	1	0	0%
2	2019	11	1	9,09%

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikasi ISO Pengadilan)

1. Posbakum

Posbakum di Pengadilan Negeri Koba memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Sebagai komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan layanan masyarakat ini, diwujudkan dengan diberikan honorarium bagi petugas Posbakum yang dibebankan pada DIPA Eselon I Badan Peradilan Umum. Pada tahun anggaran 2019, anggaran yang diberikan untuk pemberian layanan Posbakum ini sebesar Rp. 24.000.000 (*Dua puluh empat juta rupiah*).

2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengadilan demi meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan, Mahkamah Agung menuntut setiap pengadilan meningkatkan akses tersebut dengan adanya sidang keliling maupun pelayanan terpadu. Pada Pengadilan Negeri Koba, kebijakan untuk melakukan sidang keliling dipandang tidak memungkinkan sehingga pelayanan terpadu menjadi pilihan dalam rangka peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap peradilan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan menempatkan pegawai-pegawai yang kompeten untuk ditempatkan di satu titik pelayanan sebagai tempat masuk dan keluarnya layanan peradilan. Sehingga masyarakat hanya berhenti di satu pintu layanan saja.

Layanan satu pintu Pengadilan Negeri Koba menempatkan wakil dari masing-masing kepaniteraan perdata, pidana dan hukum untuk melayani pengunjung pengadilan. Hanya saja pelayanan ini.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Salah satu bentuk pemberian akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah prodeo, yaitu membebaskan seluruh atau sebagian biaya perkara kepada APBN sehingga masyarakat yang memenuhi syarat tidak perlu mengeluarkan biaya perkara untuk memperoleh layanan di pengadilan.

Layanan prodeo di Pengadilan Negeri Koba belum dapat menyentuh masyarakat di wilayah hukum pengadilan. Belum ada masyarakat yang mengajukan untuk mendapatkan layanan ini. Masih dilakukan evaluasi kebijakan di Pengadilan Negeri Koba terhadap prodeo baik dari sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya prodeo maupun kesadaran masyarakat untuk mendapatkan layanan ini.

Tahun Anggaran 2019 DIPA Pengadilan Negeri Koba tidak memperoleh alokasi anggaran untuk jenis layanan pembebasan Biaya Perkara ini, sehingga selama tahun 2019 tidak terdapat kegiatan yang berhubungan dengan pembebasan biaya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan ini.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel 3. 1. Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/ golongan/ pendidikan

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	YULIANA, S.H., M.H.	Ketua	
2	SUBRONGO, S.H., M.H.	Wakil Ketua	
3	RONY DANIEL RICARDO, S.H., M.H.	Hakim	
4	RAHARDHI PERDANA, S.H., M.H.	Panitera	
5	JAMALUDIN, S.H.	Sekretaris	
6	PADLI, S.H.	Panmud Perdata	
7	YUSBET HARIRI, S.H.	Panmud Pidana	
8	ERWIN MARANTIKA, S.H.	Panmud Hukum	
9	EKO ARFANDI, S.H.	Jurusita	
10	MARIHOT PANGIHUTAN	Jurusita	
11	OSKAR SYAIFULLAH, S.Kom	Kasubbag Umum dan Keuangan	
12	NURKAMALIA, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
13	YEYEN WAHYUNI, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	
14	NOVIA NANDA PERTIWI, S.H.	Cakim	
15	DEVIA HERDITA, S.H.	Cakim	
16	DIANA RETNOWATI, S.H.	Cakim	
17	RIZKI RIDHA DAMAYANTI, S.H., M.H.	Cakim	
18	SILVA DA ROSA, S.H., M.H	Cakim	
19	NAOMI RENATA MANIHURUK, S.H.	Cakim	
20	GLORY AUDINA RENTA CAROLINE SILABAN, S.H.	Cakim	
21	MAGDALENA SIMANUNGKALIT, S.H.	Cakim	
22	TREMA FEMULA GRAFIT, S.H., M.H.	Cakim	
23	HARDI JUMAIDI, S.H.	CPNS	
24	SARTIKA RATNASARI SINAGA, S.E.	CPNS	
25	ABAD RIBUNANURIN, A.Md	CPNS	

Namun, jumlah SDM tersebut jauh dari kebutuhan ideal. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai, kebutuhan pegawai teknis dan non teknis dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 2. Tenaga Teknis dan Non Teknis Tahun 2019

NO	JABATAN	KEBUTUHAN	BEZETTING	KEKURANGAN
1	Hakim	11	1	10
2	Panitera Pengganti	16	0	16
3	Jurusita/Jurusita Pengganti	3	2	1
4	Pegawai	40	25	15

1. MUTASI

Pada tahun 2019 terjadi beberapa mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Koba, baik yang masuk ke Pengadilan Negeri Koba dan keluar dari Pengadilan Negeri Koba, yaitu :

- Tanggal 01 April 2019 Penerimaan CPNS Pengadilan Negeri Koba atas nama Hardi Jumaidi, S.H.
- Tanggal 01 April 2019 Penerimaan CPNS Pengadilan Negeri Koba atas nama Sartika Ratnasari Sinaga, S.E.
- Tanggal 08 April 2019 Penerimaan CPNS Pengadilan Negeri Koba atas nama Abad Ribunanurin, A.Md.
- Tanggal 19 Agustus 2019 Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan atas nama Marihot Pangihutan, dimutasikan menjadi Jurusita Pengadilan Negeri Koba.
- Tanggal 20 September 2019 Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung atas nama Yeyen Wahyuni, S.Kom., dimutasikan menjadi Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Koba.
- Tanggal 30 Oktober 2019 Ketua Pengadilan Negeri Koba atas nama Hendra Halomoan, S.H., M.H., dimutasikan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Sekayu.

-
- Tanggal 04 November 2019 Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso atas nama Subronto, S.H., M.H., dimutasikan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Koba.

2. PROMOSI

- Tanggal 20 September 2019 Pelantikan Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Koba atas nama Yeyen Wahyuni, S.Kom
- Tanggal 30 Oktober 2019 Pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Koba atas nama Yuliana, S.H., M.H.
- Tanggal 04 November 2019 Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Koba atas nama Subronto, S.H., M.H.

3. PENSIUN

Tidak ada Hakim dan Pegawai yang diusulkan Pensiun untuk Tahun 2019.

4. DIKLAT

Pada tahun 2019, beberapa pejabat dan pegawai Pengadilan Negeri Koba telah dipanggil untuk mengikuti diklat, baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ataupun instansi setempat.

a. Pendidikan dan Pelatihan Yudisial Berkelanjutan

Pada tahun 2019 tidak hakim dari Pengadilan Negeri Koba yang telah mengikuti PPHB II (Program Diklat Hakim Berkelanjutan II) dan tidak ada Panitera/Panitera Pengganti (PP) telah mengikuti Pelatihan PP Berkelanjutan.

b. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi

Pada tahun 2019, tidak ada hakim yang mengikuti program diklat sertifikasi yang diadakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. 3. Data Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim

NO	DIKLAT SERTIFIKASI	JUMLAH PESERTA
1	Sertifikasi Mediator	-
2	Sertifikasi Hakim PHI	-
3	Sertifikasi Hakim Perikanan	-
4	Sertifikasi Hakim Niaga	-
5	Sertifikasi Hakim Tipikor	-
6	Sertifikasi Hakim Lingkungan	-
7	Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak	-

c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

Tahun 2019 ada 4 orang terdiri dari Panitera ,Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum dari Pengadilan Negeri Koba yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.

d. Diklat Dalam Jabatan

Pada tahun 2019, ada 1 Pegawai dari Pengadilan Negeri Koba yang telah mengikuti diklat Kepemimpinan yang diadakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

Tabel 3. 4. Pelatihan Diklat Kepemimpinan

NO	NAMA PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	1
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	-
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Penyelenggara Lembaga Administrasi Negara RI)	-
4	Diklat Sekretaris Pengadilan	-
5	Diklat Panitera Pengadilan	-

e. Diklat Teknis Umum/Administrasi Manajemen

Pada tahun 2019, tidak ada Pegawai dari Pengadilan Negeri Koba yang mengikuti diklat teknis umum/administrasi manajemen yang diadakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

Tabel 3. 5. Diklat Pelatihan Teknis Umum/ Administrasi Manajemen

NO	NAMA PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
1	Diklat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	-
2	Diklat Akuntansi Berbasis Akrual	-
3	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	-
4	Diklat Sertifikasi Bendahara	-
5	Diklat Penyusunan LKjIP	-
6	Diklat Penyusunan Angka Kredit Widyaiswara	-
7	TOT Manajemen SAKIP	-
8	Diklat KIP	-
9	Diklat Teknis Perencana	-

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI
INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Negeri Koba melaksanakan reformasi keuangan negara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada publik (*clean government*) melalui implementasi perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

1. Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran

a) Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2019

Mengingat Pengadilan Negeri Koba baru diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 sehingga Pengadilan Negeri Koba mulai menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2019 dipenghujung tahun 2018.

b) Alokasi Anggaran Pengadilan Negeri Koba

Setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga disahkan oleh Menteri Keuangan, Pengadilan Negeri Koba menerima Rencana Kerja dan Anggaran (berupa DIPA) dengan Nomor: SP DIPA-005.01.2.401912/2019 tertanggal 05 Desember 2018 untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp 3.366.599.000,00 dan Nomor : SP DIPA-005.03.2.402020/2019 tertanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp 119.400.000,00 untuk DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum).

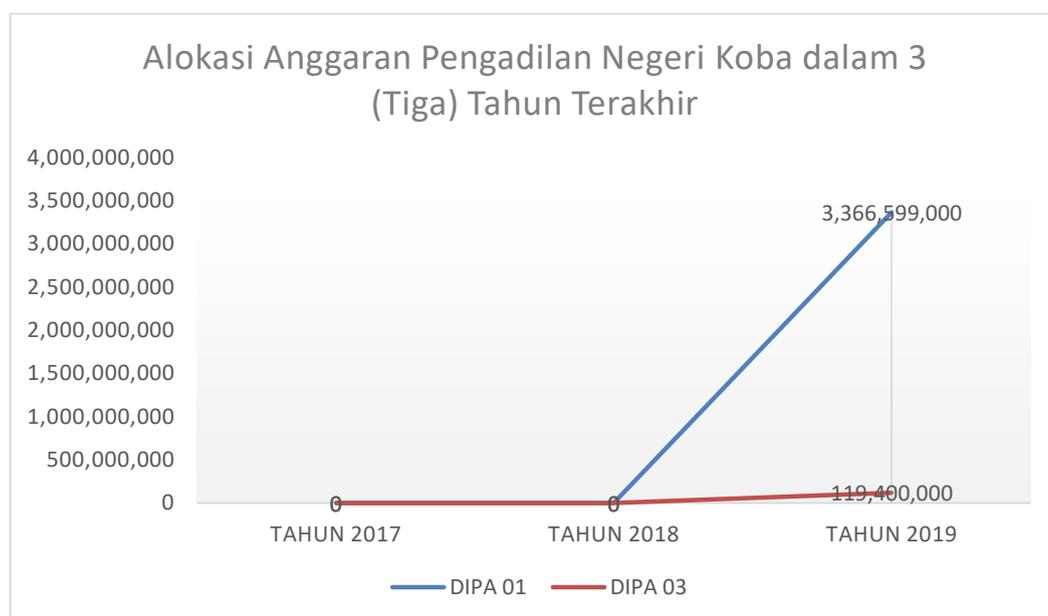
Adapun perincian penggunaan anggaran dari masing-masing pagu program sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.066.599.000,00 digunakan untuk kegiatan:
 - Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp 2.652.739.000,00
 - Biaya Operasional (kebutuhan pokok perkantoran dan pemeliharaan) sebesar Rp 413.860.000,00
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 300.000.000,00 digunakan untuk kegiatan:
 - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 sebesar Rp. 250.000.000,00
 - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 sebesar Rp. 50.000.000,00
- 3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 119.400.000,00 digunakan untuk kegiatan:
 - Pos Bantuan Hukum sebesar Rp 24.000.000,00
 - Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu sebesar Rp 95.400.000,00

Tabel 4.1. 1. Alokasi Anggaran Pengadilan Negeri Koba selama 3 (Tiga) Tahun Terakhir (dalam Rupiah)

NO	JENIS DIPA	TAHUN ANGGARAN APBN		
		2017	2018	2019
1	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	-	-	3.366.599.000
2	DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)	-	-	119.400.000
TOTAL		-	-	3.485.999.000

Grafik 4.1. 1. Alokasi Anggaran Pengadilan Negeri Koba dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir (dalam Rupiah)



Dapat dilihat dari grafik diatas, bahwa Pengadilan Negeri Koba baru berdiri tanggal 22 Oktober 2018 dengan alokasi anggaran pada tahun tersebut masih menginduk pada Pengadilan Negeri Sungailiat sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan kenaikan alokasi pagu anggaran untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) dalam 3 Tahun terakhir.

2. Pengelolaan APBN pada Pengadilan Negeri Koba

a) Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019

Selain perundang-undangan diatas, dalam penatausahaan pelaksanaan APBN Pengadilan Negeri juga berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, Perdirjen Perbendaharaan Kemenkeu yang berlaku serta surat edaran yang berkaitan dengan penatausahaan pelaksanaan APBN.

Sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 162/PMK.05/2013, Pengadilan Negeri Koba dalam pelaksanaan APBN menggunakan sistem manajemen informasi keuangan negara yang dikembangkan oleh Kemenkeu berupa Sistem Aplikasi Satker (SAS), Gaji Pegawai Pusat (GPP), Sistem Monitoring

dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) serta didukung oleh aplikasi Sistem Informasi Mahkamah Agung (SIMARI) dan Komunikasi Data Nasional (Komdanas) dari Mahkamah Agung.

b) Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam penatausahaan PNBP, Pengadilan Negeri Koba juga berpedoman pada PMK, Perdirjen Kemenkeu, surat Kabua serta surat-surat edaran yang terkait dengan PNBP. Dalam penatausahaan PNBP Pengadilan Negeri Koba telah menggunakan sistem manajemen informasi yang dikembangkan Mahkamah Agung RI bernama Aplikasi PNBP melalui dukungan SIMARI online, sesuai dengan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 212-I/SEK/KU.01/08/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pemakaian Aplikasi PNBP pada SIMARI online. Penatausahaan yang dilakukan Bendahara Penerimaan mulai dari penetapan target PNBP, penerimaan uang PNBP, penyetoran uang PNBP, pembukuan PNBP, pelaporan Realisasi PNBP dilakukan menggunakan aplikasi ini, sehingga seluruh Bendahara Penerimaan akan tertib, seragam, dan lebih akuntabel dalam penatausahaan PNBP.

c) Pelaporan Keuangan Pengadilan Negeri Koba Tahun 2019

Pelaksanaan pelaporan Pengadilan Negeri Koba telah mengimplementasikan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA) dengan didukung oleh Aplikasi Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Aplikasi Persediaan serta mengikuti update aplikasi yang berkelanjutan.

Pengadilan Negeri Koba juga telah mengimplementasikan penggunaan aplikasi e-RekonLK sebagaimana Surat Dirjen Perbendaharaan S-4839/PB/2016.

3. Capaian Pengelolaan APBN Pengadilan Negeri Koba

a) Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Koba Tahun 2019

Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Koba Tahun Anggaran 2019 untuk pagu DIPA 01 dengan pagu anggaran setelah revisi terakhir sebesar Rp 2.794.565.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 telah terealisasi sebesar Rp. 2.766.097,00 mencapai persentase 98,98% dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2019 Menurut Program (dalam Rupiah)

Tabel 4.1. 2. Realisasi Penyerapan Anggaran Per Program

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	2.369.565.000	2.350.591.671	99,2	18.973.329	0,8
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	425.000.000	415.506.000	97,77	9.494.000	2,23
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	119.400.000	117.327.501	98,26	2.072.499	1,74
TOTAL		2.913.965.000	2.883.425.172	98,95	30.539.828	1,05

* sumber data : <http://spanint.kemenkeu.go.id> per 02 Januari 2020

- 2) Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2019 menurut Jenis Belanja (dalam Rupiah)

Tabel 4.1. 3. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) per Jenis Belanja

NO	BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.872.405.000	1.868.076.816	99,77	4.328.184	0,23
2	Belanja Barang	497.160.000	482.514.855	97,05	14.645.145	2,95
3	Belanja Modal	425.000.000	415.506.000	97,77	9.494.000	2,23
TOTAL		2.794.565.000	2.766.097.671	98,98	28.467.329	1,02

* sumber data : <http://spanint.kemenkeu.go.id> per 02 Januari 2020

Pada tabel di atas dapat terlihat adanya sisa anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) yang tidak terserap. Hal ini dikarenakan:

- a. Belanja Pegawai :
 - Sudah optimal dengan serapan sebesar 99,77%
- b. Belanja Barang
 - Sudah optimal dengan serapan sebesar 97,05%
- c. Belanja Modal
 - sudah optimal dengan serapan sebesar 97,77 %

Tabel 4.1. 4. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) per Jenis Belanja

NO	BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	Belanja Barang	119.400.000	117.327.501	98,26	2.072.499	1,74
TOTAL		119.400.000	117.327.501	98,26	2.072.499	1,74

* sumber data : <http://spanint.kemenkeu.go.id> per 02 Januari 2020

Pada tabel di atas dapat terlihat adanya sisa anggaran DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) pada belanja barang yang tidak terserap. Hal ini dikarenakan :

- Adanya kegiatan yang kurang optimal, sehingga mempengaruhi penyerapan.
- Pembebasan biaya perkara yang terkendala dengan syarat-syarat dalam pengajuannya.

3) Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 4.1. 5. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

NO	BELANJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
DIPA 01										
1	Pegawai	0	0	0	0	0	0	1.872.405.000	1.868.076.816	99,77
2	Barang	0	0	0	0	0	0	497.160.000	482.514.855	97,05
3	Modal	0	0	0	0	0	0	425.000.000	415.506.000	97,77
DIPA 03										
1	Barang	0	0	0	0	0	0	119.400.000	117.327.501	98,26
TOTAL (DIPA 01 + 03)		0	0	0	0	0	0	2.913.965.000	2.883.425.172	98,95

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Koba baru berdiri tanggal 22 Oktober 2018 dengan alokasi anggaran ditahun tersebut masih menginduk pada Pengadilan Negeri Sungailiat sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan kenaikan alokasi pagu anggaran untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) dalam 3 Tahun terakhir.

4) Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2019

Pada Tahun 2019, Pengadilan Negeri Koba telah menggunakan aplikasi SIMARI Online dalam hal penerimaan PNBP, pembukuan dan pelaporan, sedangkan dalam penyetoran PNBP memakai aplikasi SIMPONI dari Kementerian Keuangan.

Target PNBP Pengadilan Negeri Koba untuk tahun anggaran 2019 adalah masing-masing Rp. 0,00 untuk PNBP Umum dan Rp. 8.335.300 untuk PNBP Fungsional. PNBP Umum diperoleh dari kontribusi pendapatan umum Pengadilan Negeri Koba berupa sewa rumah dinas, sedangkan PNBP fungsional diperoleh dari kontribusi pendapatan fungsional Pengadilan Negeri Koba. Adapun realisasi PNBP Pengadilan Negeri Koba sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 8.335.300 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1. 6. Target dan Realisasi PNBP UMUM Per Akun

NO	MAP	URAIAN JENIS PNBP	TARGET	REALISASI	%
1	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
TOTAL			0	0	0

Tabel 4.1. 7. Target dan Realisasi PNBP FUNGSIONAL Per Akun

NO	MAP	URAIAN JENIS PNBP	TARGET	REALISASI	%
1	425231	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	0	50.000	0,00
2	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan	0	1.531.000	0,00

		Pengadilan (Peradilan)			
3	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	3.060.000	0,00
4	425239	Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya	0	3.694.300	0,00
TOTAL			0	8.335.300	0,00

b) Pengadaan

Untuk tahun 2019, Pengadilan Negeri Koba mendapatkan dana untuk belanja modal sebesar Rp. 425.000.000,00 yang terdiri dari 4 pengadaan:

1. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 sebesar Rp. 254.200.000,00 yang dilaksanakan di bulan Mei 2019, dipercayakan pada kontraktor PT. NIAGA BANGKA AUTOMOBILE dengan perjanjian kerja sesuai dengan kontrak nomor : 07/PPK-PN.KOBA/IV/2019 tanggal 24 April 2019 dengan nilai kontrak Rp. 254.107.500,00;
2. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 sebesar Rp. 45.800.000,00 yang dilaksanakan di bulan Mei 2019, dipercayakan pada kontraktor CV. SUMBER JADI dengan perjanjian kerja sesuai dengan kontrak nomor : 05/PPK-PN.KOBA/IV/2019 tanggal 24 April 2019 dengan nilai kontrak Rp. 45.600.000,00;
3. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP berupa Pengadaan Laptop Hakim (BA.BUN) sebesar Rp. 39.000.000,00 yang dilaksanakan dibulan Agustus 2019, dipercayakan pada PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI dengan perjanjian kerja sesuai dengan kontrak nomor : W7.U4/22/BAPHP/PLH/PL.01/8/2019 tanggal 23 Agustus 2019 dengan nilai kontrak Rp. 38.548.500,00 ;
4. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung E-Court sebesar Rp. 86.000.000,00 yang dilaksanakan dibulan September 2019, dipercayakan pada kontraktor DUTA BINTANG UTAMA dengan perjanjian kerja sesuai dengan kontrak nomor W7.U4/30/SPK/APD-PE/PL.04/9/2019 tanggal 03 September 2019 dengan nilai kontrak Rp. 77.250.000,00;

c) Penghapusan

Pada Tahun 2019, Pengadilan Negeri Koba belum mengadakan penghapusan.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Aset Tanah

Tanah merupakan aset tetap yang digunakan untuk mendirikan gedung kantor dan rumah negara. Adapun tanah yang dalam penguasaan Pengadilan Negeri Koba sampai akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. 1. Data Aset Tanah dalam Penguasaan Pengadilan Negeri Koba

NO	PERUNTUKAN	LUAS TANAH (M ²)	LOKASI	NOMOR SERTIFIKAT	KET
1	Tanah persil perkantoran	7.375	Jalan Titian Puspa, Kel. Padang Mulya, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah.	Hak Pakai No. 00066	
2	Tanah persil perumahan	-	-	-	
3	Tanah persil perumahan	-	-	-	
4	Tanah persil perumahan	-	-	-	
5	Tanah persil perumahan	-	-	-	

2. Gedung dan Bangunan

Tidak ada aset gedung dan bangunan yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Koba, dikarenakan belum adanya pembangunan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Koba.

Tabel 4.2. 2. Data Aset Gedung dan Bangunan dalam Penguasaan Pengadilan Negeri Koba

NO	URAIAN	KONDISI			JUMLAH	KET
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT		
I. GEDUNG KANTOR						
1	Gedung Kantor	-	-	-	-	-
II. RUMAH DINAS						
1	Rumah Dinas Ketua	-	-	-	-	-
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	-	-	-	-	-
3	Rumah Dinas Hakim	-	-	-	-	-
4	Rumah Dinas Panitera	-	-	-	-	-
5	Rumah Dinas Sekretaris	-	-	-	-	-

3. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas dalam penguasaan Pengadilan Negeri Koba yang digunakan untuk menunjang mobilitas pejabat peradilan sebanyak 3 (tiga) aset yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 4.2. 3. Kendaraan Dinas dalam Penguasaan Pengadilan Negeri Koba

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I. JENIS KENDARAAN RODA 4						
1	Honda BR-V 1.5 EMT CKD	2019	v	-	-	-
II. JENIS KENDARAAN RODA 2						
1	Yamaha BYSON 150	2019	v	-	-	-
2	Yamaha BYSON 150	2019	v	-	-	-

4. Fasilitas Gedung dan Fasilitas Perkantoran

Tabel 4.2. 4. Matriks Sarana dan Prasarana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
I. GEDUNG			
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	1	
7	Ruang Sidang Anak	1	
8	Ruang Kepaniteraan	1	
9	Ruang Kesekretariatan	2	
10	Ruang Server	1	
11	Ruang Tunggu Sidang Anak	1	
12	Ruang Hakim Ad Hoc	-	
13	Ruang Tunggu Pengacara	1	
14	Ruang Tunggu Jaksa	1	
15	Ruang Rapat	-	
16	Ruang Perpustakaan	1	
17	Ruang Mediasi	1	
18	Ruang Kesehatan	1	
19	Ruang Ibu dan Anak	1	
20	Ruang Arsip Kepaniteraan	1	
21	Ruang Arsip Kesekretariatan	-	
22	Ruang Tahanan	2	
23	Ruang Posbakum	1	
II. FASILITAS PERKANTORAN			
24	Lemari Besi/Metal	4	
25	Lemari Kayu	3	
26	Rak Besi	2	
27	Rak Kayu	-	

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
28	Filing Cabinet Besi	-	
29	Brandkas	1	
30	Lemari Display	-	
31	Tabung Pemadam Api	2	
32	CCTV - Camera Control Television System Buah	-	
33	Papan Visual/Papan Nama	6	
34	Peta	-	
35	Mesin Absensi	1	
36	Perkakas Kantor Lainnya	10	
37	Meja Kerja Besi/Metal	-	
38	Meja Kerja Kayu	44	
39	Kursi Besi/Metal	40	
40	Kursi Kayu	20	
41	Sice	1	
42	Bangku Panjang Kayu	4	
43	Meja Rapat	1	
44	Meja Komputer	-	
45	Meja Resepsionis	-	
46	Kasur/Spring Bed	-	
47	Meja Makan Kayu	-	
48	CAT 6 Cable	3	
49	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	-	
50	Mesin Pemotong Rumput	-	
51	Lemari Es	-	
52	A.C. Split	6	
53	Kipas Angin	-	
54	Exhause Fan	-	
55	Acces Point	4	
56	Televisi	-	
57	Loudspeaker	-	
58	Sound System	1	
59	Rak Server	1	

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KET
60	Microphone	-	
61	Lambang Garuda Pancasila	2	
62	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4	
63	Tiang Bendera	2	
64	Dispenser	-	
65	Palu Sidang	2	
66	Lambang Instansi	1	
67	Vertikal Blind	-	
68	Bendera Negara	2	
69	Audio Visual	-	
70	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4	
71	Weapon & Metal Detector (Check Gate)	1	
72	Layar Film/Projector	-	
73	Telephone	-	
74	Facsimile	-	
75	Genset	0	
76	Komputer	9	
77	Laptop	5	
78	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	-	
79	Printer	4	
80	Infocus	-	
81	PABX	-	
82	Server	2	
83	Router	6	
84	Hub	1	
85	Kamera	-	
86	Stabilisator	1	
87	Komputer Jaringan Lainnya	1	
88	Monitor	1	
89	Bangku Panjang Besi/Metal	2	
III. ASET TETAP LAINNYA			
90	Monografi	-	

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka mengenai administrasi Perkara di Pengadilan dapat dilakukan secara elektronik. Yaitu dengan mengakses alamat website <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

Pendaftaran perkara melalui e-court saat ini sudah dilakukan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lainnya yang terdiri dari Perorangan dan Badan Hukum.

Terdapat 4 layanan yang dapat diberikan kepada pengguna :

- a. E-Filing (Pendaftaran perkara online)
- b. E-Payment (Pembayaran panjar biaya perkara online)
- c. E-Summons (Pemanggilan pihak secara online)
- d. E-Litigasi (Persidangan secara online)

Pengadilan Negeri Koba pada Tahun 2019 sudah melaksanakan Administrasi Pengadilan secara elektronik dialamat website E-Court tersebut. Tercatat sudah 26 perkara yang telah terdaftar, dengan rincian yaitu :

- a. 9 Pendaftaran Perkara Gugatan Online (*gambar terlampir*)
- b. 2 Pendaftaran Perkara Gugatan Sederhana Online (*gambar terlampir*)
- c. 15 Pendaftaran Perkara Permohonan Online (*gambar terlampir*)

Dari 26 perkara tersebut diatas, belum pernah dilaksanakan Persidangan secara elektronik/online (e-Litigasi) dikarenakan secara infrastruktur belum terpenuhi dan instruksi pelaksanaan e-Litigasi untuk seluruh Pengadilan dimulai pada bulan Januari Tahun 2020.

Daftar Gugatan Online

Daftar Perkara di Pengadilan Anda

Klik Nomor Register Pendaftaran untuk melihat detail Pendaftaran

Show 10 entries

No	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Panjar Perkara	Nomor Perkara & Tanggal Pendaftaran
1	PN KBA-122019PCG 26 Desember 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregister	Rp. 356.500	31/Pdt.G/2019/PN kba 26 Desember 2019
2	PN KBA-122019WUN 18 Desember 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregister	Rp. 766.000	30/Pdt.G/2019/PN kba 18 Desember 2019
3	PN KBA-112019CZO 27 November 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregister	Rp. 166.000	29/Pdt.G/2019/PN kba 28 November 2019
4	PN KBA-112019DYS 21 November 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregister	Rp. 766.000	28/Pdt.G/2019/PN kba 21 November 2019
5	PN KBA-102019W4X 22 Oktober 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 16 Desember 2019	Rp. 466.000	27/Pdt.G/2019/PN kba 23 Oktober 2019
6	PN KBA-102019ONI 21 Oktober 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 28 November 2019	Rp. 766.000	26/Pdt.G/2019/PN kba 21 Oktober 2019
7	PN KBA-102019E33 17 Oktober 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 3 Desember 2019	Rp. 766.000	25/Pdt.G/2019/PN kba 18 Oktober 2019
8	KBA-102019TZK 8 Oktober 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 18 November 2019	Rp. 2.656.000	24/Pdt.G/2019/PN kba 9 Oktober 2019
9	KBA-072019GZG 19 Juli 2019	Sudah Dibayar (Melakukan konfirmasi Pembayaran)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 24 Oktober 2019	Rp. 801.000	16/Pdt.G/2019/PN kba 22 Juli 2019

Showing 1 to 9 of 9 entries

First Previous 1 Next Last

Gambar 4.3. 1. Tampilan Daftar Gugatan Online pada Aplikasi e-Court

Daftar Gugatan Sederhana Online

Daftar Perkara di Pengadilan Anda

Klik Nomor Register Pendaftaran untuk melihat detail Pendaftaran

Show 10 entries

No	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Panjar Perkara	Nomor Perkara & Tanggal Pendaftaran
1	PN KBA-112019BTS 15 November 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 9 Desember 2019	Rp. 351.000	5/Pdt.G.S/2019/PN kba 15 November 2019
2	PN KBA-112019BK 15 November 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 9 Desember 2019	Rp. 351.000	4/Pdt.G.S/2019/PN kba 15 November 2019

Showing 1 to 2 of 2 entries

First Previous 1 Next Last

Gambar 4.3. 2. Tampilan Daftar Gugatan Sederhana Online

Daftar Permohonan Online

Daftar Perkara di Pengadilan Anda

Klik Nomor Register Pendaftaran untuk melihat detail Pendaftaran

Show 10 entries

No	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Panjar Perkara	Nomor Perkara & Tanggal Pendaftaran
1	PN KBA-122019WF2 10 Desember 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 20 Desember 2019	Rp. 131.000	50/Pdt.P/2019/PN kba 12 Desember 2019
2	PN KBA-112019EH2 28 November 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 16 Desember 2019	Rp. 131.000	49/Pdt.P/2019/PN kba 29 November 2019
3	PN KBA-112019EQY 27 November 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 6 Desember 2019	Rp. 131.000	48/Pdt.P/2019/PN kba 27 November 2019
4	PN KBA-112019GI1 27 November 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 6 Desember 2019	Rp. 131.000	47/Pdt.P/2019/PN kba 27 November 2019
5	PN KBA-1120194ZK 22 November 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 13 Desember 2019	Rp. 131.000	46/Pdt.P/2019/PN kba 25 November 2019
6	PN KBA-112019155 22 November 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 6 Desember 2019	Rp. 131.000	45/Pdt.P/2019/PN kba 22 November 2019
7	PN KBA-112019JN 20 November 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 2 November 2019	Rp. 131.000	44/Pdt.P/2019/PN kba 21 November 2019
8	PN KBA-1120192OU 8 November 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 19 November 2019	Rp. 131.000	43/Pdt.P/2019/PN kba 8 November 2019
9	PN KBA-112019ENZ 7 November 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 27 November 2019	Rp. 131.000	42/Pdt.P/2019/PN kba 7 November 2019
10	PN KBA-112019KGC 6 November 2019	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otonomi)	Perkara Teregister - Putusan Tanggal Putusan : 6 Desember 2019	Rp. 131.000	41/Pdt.P/2019/PN kba 7 November 2019

Showing 1 to 10 of 15 entries

First Previous 1 2 Next Last

Gambar 4.3. 3. Tampilan Daftar Permohonan Online

2. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum

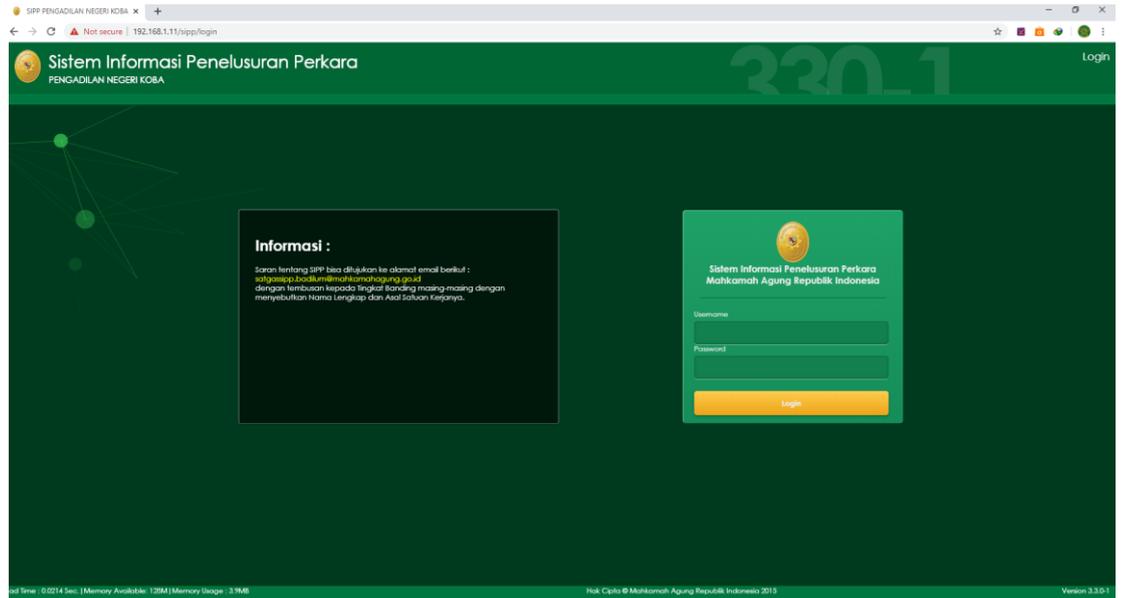
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah sistem yang digunakan untuk membantu pengelolaan administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data serta layanan informasi. Pada saat ini Pengadilan Negeri Koba telah menggunakan SIPP yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung yang telah mencapai versi 3.3.0-1. Adapun sistem tersebut ditunjang oleh server yang memadai di ruang server Pengadilan Negeri Koba dan ditangani oleh 1 (satu) administrator yang siap menanggapi permasalahan yang timbul.

Adapun rincian spesifikasi server yang digunakan untuk menunjang implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Koba dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

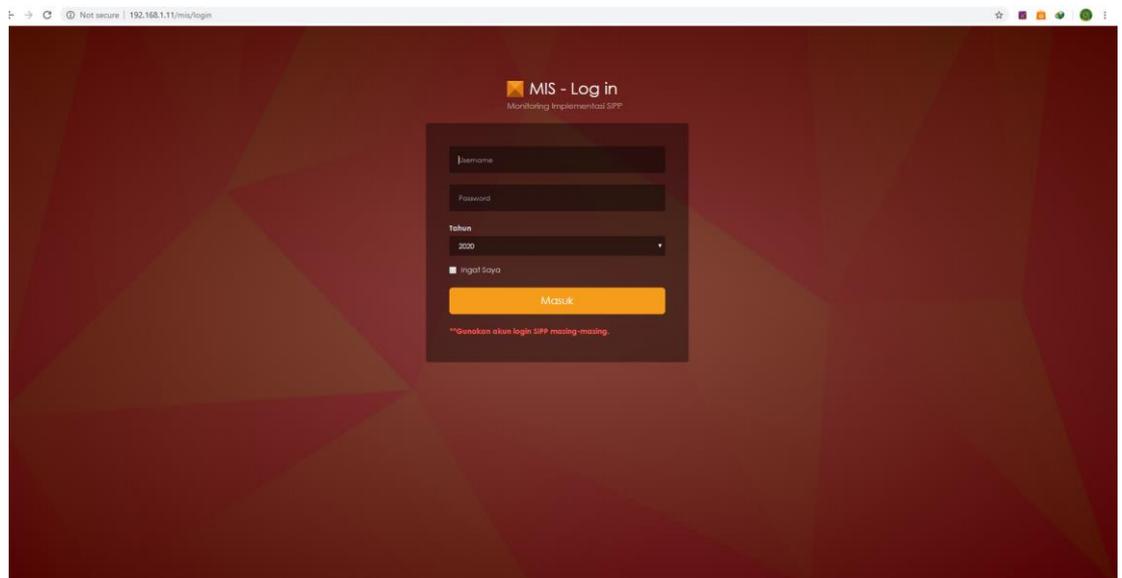
Tabel 4.3. 1. Rincian Spesifikasi Server Penunjang SIPP pada Pengadilan Negeri Koba

No	Sarana/ Prasarana	Jumlah	Spesifikasi
1	Server Dell	1	<ul style="list-style-type: none">RAM : 16 GBCPU : Intel® Xeon (R) CPU E3-1220 v6 @ 3.00GHzHDD : 2 TB
2	Server Fujitsu	1	<ul style="list-style-type: none">RAM : 32 GBCPU : Intel® Xeon (R) E-2134 CPU @3.50GHz x 8HDD : 2 TB

Dengan dikembangkannya aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP), para user SIPP di Pengadilan Negeri Koba terbantu untuk membenarkan data pada SIPP. Aplikasi MIS ini hanya merupakan alat bantu untuk memantau kelengkapan data SIPP, juga sebagai bahan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan terkait percepatan proses penyelesaian perkara kedepan dengan tetap berpijak pada kaidah-kaidah hukum dan keadilan serta perbaikan pencatatan administrasi perkara melalui SIPP.



Gambar 4.3. 4. Tampilan Halaman Login Aplikasi SIPP



Gambar 4.3. 5. Tampilan Halaman Login Aplikasi MIS

- Perangkat Teknologi Informasi untuk Menunjang Implementasi SIPP
Perangkat teknologi informasi untuk menunjang implementasi SIPP yang telah dimiliki oleh Pengadilan Negeri Koba adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3. 2. Daftar Perangkat Penunjang Teknologi Informasi

No.	Harware / Software	Jumlah/Uraian	Keterangan / Kondisi
1.	Server	2 Unit	Baik
2.	Mikrotik <i>Router</i>	1 Unit	Baik
3.	Laptop	5 Unit	Baik
4.	<i>Switch</i>	1 Unit	Baik
5.	<i>Wifi Modem Router</i>	5 Unit	Baik
7.	Koneksi Internet	<ul style="list-style-type: none"> • Telkom Indihome kecepatan Up to 20 Mbps • Astinet kecepatan 16/16 Mbps dedicated 	Baik
8.	Komputer PC	9 Unit	Baik
9.	Web hosting	Kapasitas unlimited	Baik
10.	Access Point	4 Titik	Baik

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa/ kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul/ Prima (Indonesia Court Performance Excellent / ICPE). Upaya Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Koba dilakukan dengan memperkuat system Manajemen mutu yang mengacu pada system yang dikembangkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang terdiri dari aspek Leadership, Customer Focus, Process Management, Strategic Planning, Resources Management, Document System, Performance Result. Dengan system penjaminan mutu tersebut kemudian ditetapkan standar penjaminan mutu pelayanan. Meski tergolong masih baru berdiri, Pengadilan Negeri Koba berusaha untuk memenuhi standar yang telah di tetapkan tersebut dengan membentuk Tim Akreditasi Penjamin Mutu berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor W7.U4 /0461.a/OT.01.3/4/2019 tanggal 15 April 2019.

Tim Akreditasi tersebut bertugas melakukan persiapan pelaksanaan penjaminan mutu pengadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Koba dengan penerapan International Framework for Court Excellent, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan zona integritas dan standar penilaian pengadilan. Untuk penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu pertama oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu dari Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 20 November 2019.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengadilan demi meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan, Mahkamah Agung menuntut setiap pengadilan meningkatkan akses tersebut dengan adanya Pelayanan Terpadu.

Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan menempatkan pegawai-pegawai yang kompeten untuk ditempatkan disatu titik pelayanan sebagai tempat masuk dan keluarnya layanan peradilan. Sehingga masyarakat hanya berhenti di satu pintu layanan saja.



Gambar 5. 1. Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu

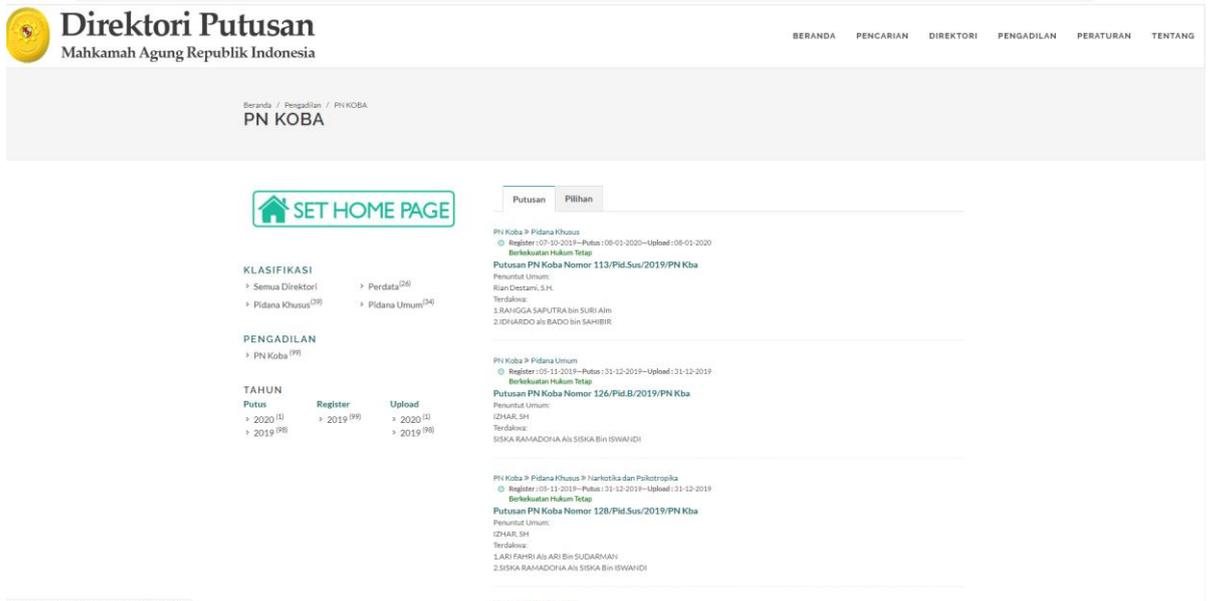
Layanan satu pintu Pengadilan Negeri Koba menempatkan wakil dari masing-masing kepaniteraan perdata, pidana, hukum dan bagian umum untuk melayani pengunjung pengadilan.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

1. Publikasi Perkara (*One Day Publish*)

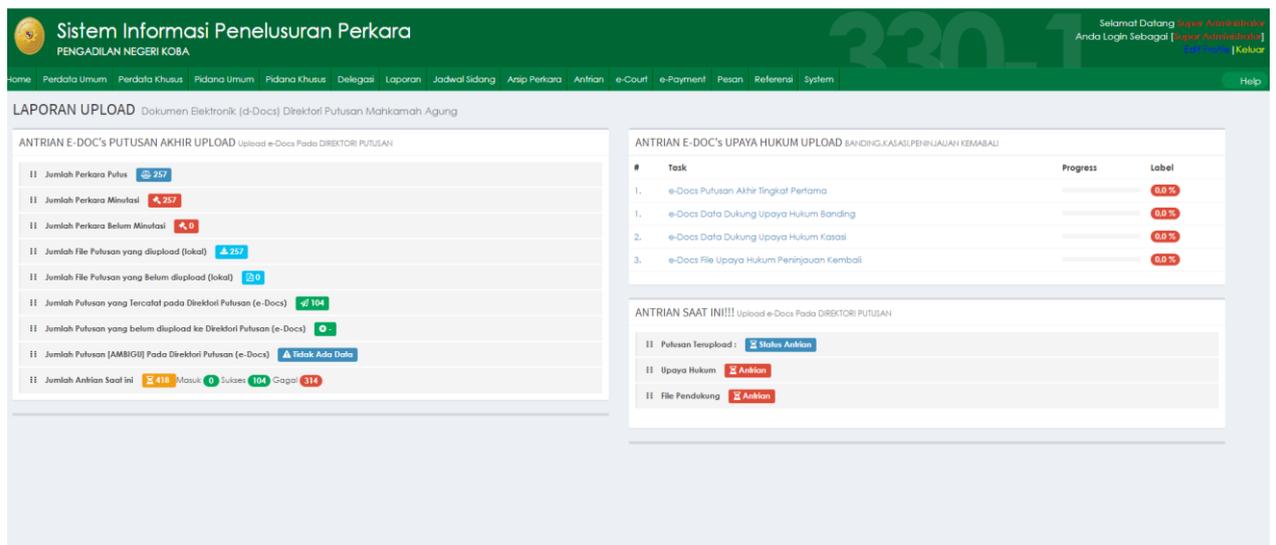
One Day Publish diartikan sebagai publikasi amar putusan suatu perkara yang telah diputus dalam jangka waktu 1x24 jam ke masyarakat/ pencari keadilan ke situs resmi. Satu perwujudan one day publish ini adalah adanya direktori putusan Mahkamah Agung RI yang dapat diakses disitus www.putusan.mahkamahagung.go.id. Situs ini adalah wadah bagi setiap putusan di Pengadilan di seluruh Indonesia untuk dapat diakses oleh masyarakat/pencari keadilan.

Terkait hal tersebut Pengadilan Negeri Koba telah mentautkan direktori putusan Pengadilan Negeri Koba pada website www.pn-koba.go.id pada kolom informasi cepat tab Direktori Putusan Mahkamah Agung. Berikut adalah tampilan direktori putusan Pengadilan Negeri Koba:



Gambar 5. 2. Tampilan Halaman Direktori Putusan Pengadilan Negeri Koba

Proses upload putusan ke direktori putusan dilakukan oleh petugas dalam jangka waktu 1x24 jam sejak suatu perkara diputus kesitus tersebut. Terkait dengan SIPP, telah keluar versi yang berkaitan dengan *one day publish*, dimana telah ada menu khusus pada aplikasi SIPP yang dapat melakukan upload ke direktori putusan. Dengan adanya fitur ini memudahkan petugas untuk melakukan upload data dalam rangka *one day publish* dengan mudah dan tepat.

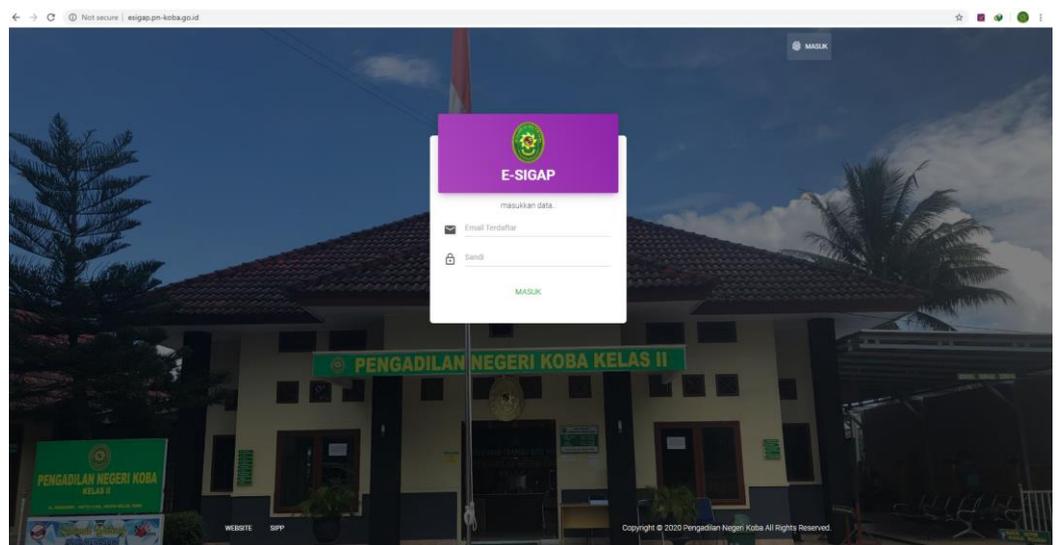


Gambar 5. 3. Menu Antrian Direktori Putusan pada Aplikasi SIPP

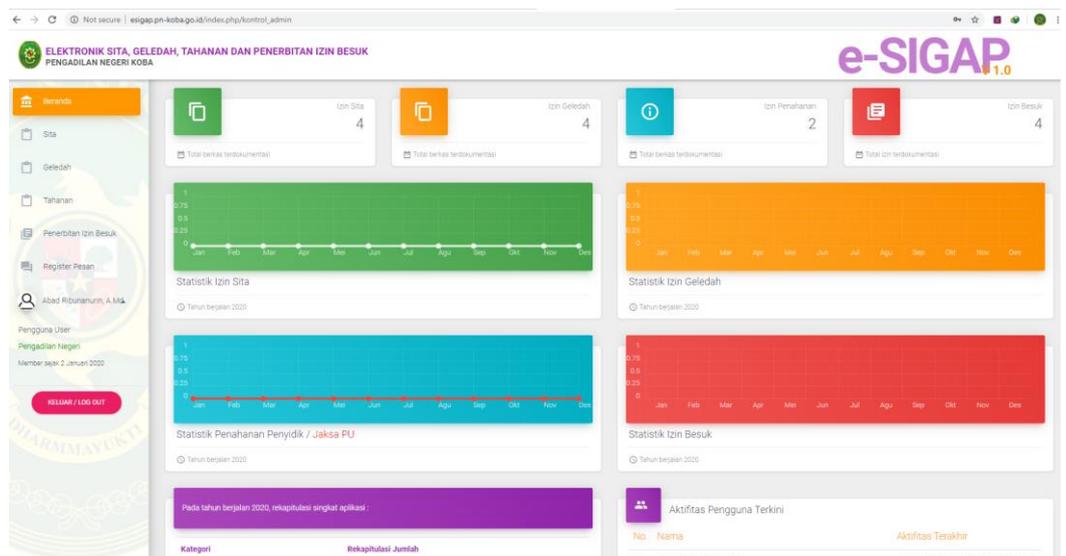
2. Aplikasi e-SIGAP

Dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Koba, maka dibuat aplikasi e-SIGAP (Elektronik Izin Sita, Geledah, Penahanan, dan Penerbitan Izin Besuk) yang diperuntukkan bagi Penyidik dan Instansi Kejaksaan yang akan melakukan administrasi peradilan. Sehingga mereka tidak perlu bersusah payah untuk bolak-balik mengurus surat/dokumen persetujuan tersebut, cukup sekali datang untuk mengambil hasil cetak (penetapan/surat izin) dimaksud sekaligus menyerahkan dokumen permohonan (*hardcopy*) yang asli.

Berikut adalah beberapa tampilan aplikasi e-SIGAP :



Gambar 5. 4. Tampilan Halaman Login Aplikasi e-SIGAP



Gambar 5. 5. Tampilan Halaman Depan Aplikasi e-SIGAP

3. Aplikasi Eraterang

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik pada seluruh Pengadilan Negeri, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah membuat aplikasi Eraterang yang merupakan Media Elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri, yang dapat diakses melalui alamat website : <http://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id>.

Berikut adalah tampilan halaman antarmuka aplikasi eraterang :



Gambar 5. 6. Tampilan Halaman Login Aplikasi Eraterang

4. Data Digital Corner

Data Digital Corner merupakan sebuah inovasi berkemajuan yang dicetuskan oleh Pengadilan Negeri Koba dalam upaya meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan didalam pemenuhan syarat data pendukung layanan yang terkait dengan *e-court*, *eraterang* maupun *e-sigap*. Hadirnya data digital corner diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan selaras dengan Visi-Misi Pengadilan Negeri Koba, Dimana masyarakat yang memerlukan copy dokumen ataupun scanner/pemindaian dokumen yang tidak memiliki sarana tersebut saat mendaftar layanan hukum di Pengadilan Negeri Koba yang berhubungan dengan akses digitalisasi tidak perlu mengalami kesulitan karena Pengadilan Negeri Koba telah menyediakan *Data Digital Corner* (Sudut Data Digital) yang akan melayani foto copy dokumen/scan dokumen dan sebagainya secara gratis dengan dibantu petugas operator yang akan melayani dengan ramah dan sepenuh hati.

Hal ini tentu meningkatkan *awareness* pencari keadilan terhadap layanan digital peradilan yang merupakan bagian dari inovasi mahkamah agung (*e-court* dan *e-litigasi*).



Gambar 5. 7. Petugas Siap Melayani Masyarakat Pencari Keadilan

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Khusus mengenai pengawasan internal, Pengadilan Negeri Koba telah menunjuk Hakim Pengawas Bidang antara lain :

1. Koordinator Pengawas Bidang
2. Pengawas Bidang Pidana
3. Pengawas Bidang Perdata
4. Pengawas Bidang Hukum
5. Pengawas Bidang Kepegawaian, dan
6. Pengawas Bidang Umum dan Keuangan
7. Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Disamping pengawasan internal yang telah berjalan sesuai ketentuan yang ada, disamping itu juga telah berjalan pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh :

1. Pengadilan Tinggi secara berkala
2. Mahkamah Agung

dimana pengawasan-pengawasan tersebut sangat dirasakan sekali dan membantu untuk kelancaran tugas secara keseluruhan.

B. EVALUASI

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Koba baik dalam pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja peradilan dan kualitas pelayanan publik dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut, hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba atau pejabat yang berkompeten untuk segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja baru dengan cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas di masa mendatang.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- Masih kurangnya SDM pada Pengadilan Negeri Koba sehingga pimpinan mengambil kebijakan untuk mengajukan permohonan permintaan tenaga tambahan kepada PEMDA setempat yang akan diperbantukan pada Pengadilan Negeri Koba;
- Jurusita pada Pengadilan Negeri Koba hanya berjumlah 2 orang dan tidak ada Jurusita Pengganti;
- Jumlah sisa perkara pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 34,48% dibandingkan tahun 2018;
- Tingkat akseptabilitas masyarakat terhadap putusan pidana lebih baik dibandingkan perkara perdata. Persentase perkara yang mengajukan banding pidana adalah sebesar 4%, sedangkan banding perdata sebesar 6,67%;
- Penyelesaian perkara dalam jangka waktu melebihi 5 bulan masih ada dilaporkan perkara perdata, namun itu untuk perkara-perkara yang memang memerlukan waktu yang lebih lama disamping faktor teknis lain yang menyebabkan lamanya penyelesaian perkara tersebut. Sedangkan untuk perkara pidana tidak ada laporan perkara yang diselesaikan lebih dari jangka waktu 5 bulan;
- Realisasi DIPA TA 2019 adalah sebesar 98,98% untuk DIPA 01 dan 98,26% untuk DIPA 03;
- Dukungan TI untuk penunjang SIPP yaitu berupa Aplikasi SIPP yang telah menggunakan versi terakhir yaitu versi 3.3.0-1; penambahan 1 server untuk backup data SIPP;
- Pengadilan Negeri Koba sudah melaksanakan administrasi Pengadilan secara elektronik pada aplikasi e-Court, tercatat sudah 26 perkara yang telah terdaftar. Dari total perkara tersebut belum pernah dilaksanakan Persidangan secara elektronik (e-Litigasi) dikarenakan secara infrastruktur belum terpenuhi dan instruksi pelaksanaan e-Litigasi untuk seluruh Pengadilan dimulai pada bulan Januari Tahun 2020.
- Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Koba telah dijalankan dengan baik dan terus menerus dikembangkan agar lebih efektif dan objektif.

B. REKOMENDASI

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 yang kami susun dan dari kesimpulan yang ada, maka berikut ini beberapa rekomendasi agar tercapainya visi dan misi Pengadilan Negeri Koba :

- Terkait pengelolaan pegawai supaya dapat ditambah SDM pada Pengadilan Negeri Koba.
- Terkait pengelolaan perkara, diharapkan supaya ada petunjuk tentang langkah-langkah menghadapi akhir tahun berkaitan dengan penyelesaian perkara yang sedang ditangani pada tahun berjalan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai target minimalisasi sisa perkara pada setiap akhir tahun.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Koba selama Tahun 2019. Laporan ini terwujud berkat kerjasama yang baik dari semua pihak dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Koba. Tentunya, dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detail namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Koba, dengan harapan tahun mendatang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang.

Koba, 09 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Koba,

YULIANA, S.H.,M.H.
NIP. 19750703 200012 2 001

**SK TIM LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI Koba KELAS II**



PENGADILAN NEGERI Koba
KELAS II

Jalan Soekarno Hatta II, Arung Dalam Telp. (0718) 69211210

Koba - Kode pos 33681

Email pengadilan.negeri.koba@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI Koba
Nomor: W7.U4/ *colla*/KP 04.6/01/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUN 2019 PADA PENGADILAN NEGERI Koba
KETUA PENGADILAN NEGERI Koba**

- Menimbang** : 1. Bahwa Pengadilan Negeri Koba sebagai salah satu instansi Pemerintah, yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba tentang pembentukan Tim Pengelola dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 .
3. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan Pengelolaan dan Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan)
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019.
- Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Negeri Koba.
- Kedua : Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : Koba

Pada tanggal : 02 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA



VULIANA

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba
Nomor : W7.U4/001/a/SK/KP 04.6/1/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

**TIM PENGELOLA DAN PENYUSUN LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019**

Penasehat : a. Ketua Pengadilan Negeri Koba
b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Koba

Penanggung Jawab : a. Panitera Pengadilan Negeri Koba
b. Sekretaris Pengadilan Negeri Koba

Anggota : a. Panitera Muda Hukum
b. Panitera Muda Pidana
c. Panitera Muda Perdata
d. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan
e. Kasubbag Umum dan Keuangan
f. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sekretariat : Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan

Ditetapkan di : Koba
Pada tanggal : 02 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI KOBAT



YULIANA